

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan berbagai kebijakan pemerintah dan untuk melaksanakan pembangunan. Penerimaan negara yang dapat membiayai kegiatan tersebut adalah dengan adanya pendapatan yang salah satunya berasal dari pajak.

Salah satu tanda keberhasilan penerimaan pajak adalah dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya ini menandakan bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan perlawanan atas hukum yang berlaku di Indonesia dalam bentuk ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Jika pajak tidak dibayar dengan sebagaimana mestinya maka hal ini akan mengganggu pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas umum yang mana ini nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada saat ini Indonesia telah menganut *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan serta mempertanggung jawabkan sendiri jumlah pajak terutangnya. Dengan demikian keberhasilan

pemungutan pajak dengan sistem ini tergantung kepada kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun, pemungutan pajak dengan sistem seperti ini mempunyai risiko yang terbilang sangat besar dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini nantinya tentu akan berakibat pada terganggunya pendapatan negara dari sektor pajak. Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah tentu saja ini juga akan mengganggu pembangunan dan kesejahteraan nasional.

Banyaknya tunggakan pajak yang terjadi dimasyarakat membuktikan bahwa masih lemahnya penagihan pajak di Indonesia, tidak sedikit dari masyarakat yang sengaja tidak membayar kewajiban pajak.

Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah demi memberikan kesadaran kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. Mulai dari meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak serta dengan meningkatkan tekhnologi di bidang perpajakan, seperti adanya sistem pajak yang berbasis online, dimana masyarakat tidak harus antri untuk membayar pajak di kantor perpajakan tapi cukup dengan membayarnya lewat bank-bank yang telah bekerjasama dengan Dirjen Pajak, mengisi formulir yang telah disediakan di website pajak maupun di tempat – tempat yang telah ada ikatan kerjasama sebelumnya dengan Kementrian Keuangan.

Penagihan pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dimana dituliskan dalam pasal 1 ayat (9), Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan

agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2009 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang terdapat pada pasal 8, Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diterbitkan dan disampaikan paling cepat setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran. Jika wajib pajak penanggung tidak melunasi utang pajaknya maka ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) / Penyitaan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Dengan adanya undang – undang penagihan pajak dengan surat paksa ini diharapkan adanya pedoman tata cara yang jelas tentang penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak agar nantinya tidak ada kesalahan dalam pemberian surat paksa pajak kepada wajib pajak, dan diharapkan juga dapat

memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dengan kepentingan negara serta memberikan kepastian hukum kepada masing masing pihak yang berhubungan dengan kepentingan penagihan utang pajak dengan surat paksa.

Namun dalam pelaksanaannya, sering ditemui berbagai masalah seperti wajib pajak yang menanggung utang pajak menolak menerima surat paksa, dan pemberitahuan yang tidak dapat dilaksanakan karena wajib pajak tersebut tidak ada ditempat, bahkan tidak jarang ada penanggung pajak yang memberikan alamat yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu diperlukan tindakan penagihan pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua berada dibawah naungan Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dua baru berdiri ditahun 2015. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua merupakan salah satu kantor pelayanan masyarakat untuk menghimpun dan menerima pendapatan negara dibidang perpajakan. Kantor ini bisa didatangi masyarakat ketika hendak membayar pajaknya.

Guna menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, aparatur pajaknya berintegritas, kompeten dan profesional serta kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. Dengan adanya kinerja yang demikian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Padang Dua maka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bisa diteliti lebih lanjut secara mendetail pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

Dari uraian diatas terlihat bahwa tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak sangatlah penting untuk diteliti, karena menyangkut permasalahan masyarakat luas, oleh karena itu penulis berkeinginan mengambil judul mengenai “TATA CARA PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua?
2. Bagaimana perkembangan penagihan utang pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan magang ini terbagi dua yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dengan penjelasan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Diharapkan selesai mengikuti kegiatan magang, penulis mampu dan terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas.

Tujuan umumnya yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan dalam memahami dunia kerja, agar nantinya tidak canggung dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.
2. Mengaplikasikan kemampuan dan pemahaman yang diperoleh selama magang untuk mendapatkan pekerjaan maupun membuka lapangan kerja baru setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pelaksanaan magang yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
2. Untuk mengetahui perkembangan penagihan utang pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

1.4 Manfaat Magang

Magang ini dapat digunakan dan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu menambah pengetahuan penulis mengenai tata cara penagihan utang dengan surat paksa kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua dan mengetahui perkembangan penagihan utang pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

2. Bagi Universitas

Yaitu terjalinnya kerjasama dan hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

3. Bagi Tempat Magang

Yaitu adanya kerjasama yang baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja sehingga tempat magang tersebut dikenal oleh kalangan akademis.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Magang adalah salah satu syarat utama yang harus dilakukan mahasiswa tingkat akhir program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar akademisnya dari Universitas Andalas. Magang merupakan bentuk dari pelatihan kerja dan pengaplikasian ilmu yang telah didapat dan dipelajari selama belajar di bangku kuliah.

Penulis melakukan magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua yang beralamat di Jalan Pemuda No.49 Padang. Magang berlangsung selama 40 hari kerja yaitu pada tanggal 04 Januari 2016 sampai 26 Februari 2016.

Penulis ditempatkan pada seksi penagihan dan seksi pemeriksaan. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan, sedangkan seksi pemeriksaan ini mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya,

serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

Pada saat magang, kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang sering dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menginput rekening koran dari Bank – Bank terkait.
2. Mengetik dan menuliskan nomor surat, serta membantu mengantarkan surat tersebut ke seksi – seksi yang telah ditentukan pada surat.
3. Membantu mendokumentasikan maupun mengarsipkan surat – surat masuk dan surat – surat keluar.

Adapun rincian kegiatan magang per hari terdapat pada Lampiran.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Untuk penulisan laporan ini, pengumpulan data-data serta keterangan-keterangan yang penting dilakukan penulis dengan metode:

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data untuk laporan magang menggunakan

2 (dua) metode yaitu :

- a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penulis melakukan penelitian / pengamatan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada pegawai yang terkait dalam penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak, dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber.

b. *Library Research* (Penelitian Keperpustakaan)

Penulis mengadakan penelitian terhadap buku-buku dan beberapa dokumen yang didapat dari pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua yang berkaitan dengan masalah penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak, guna melengkapi metode *field research*, diantaranya yaitu dokumen yang berjudul Penagihan Pajak DTSD Pajak II tahun 2014, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

2. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan laporan magang ini adalah analisa deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan magang ini terdapat lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling merhubungan antara sub satu dengan sub lainnya yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara teoritis landasan materi mengenai tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua yang dijadikan objek penelitian, gambaran operasinya dan struktur organisasi dari perusahaan tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh selama magang memuat inti dari penulisan, tentang tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua dan perkembangan penagihan utang pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

BAB V PENUTUP

Pembahasan pada bab ini berdasarkan pada pembatasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang baik bagi kantor pajak, maupun bagi pembaca maupun penulis.